

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA DINAS KOTA PALANGKA RAYA)

Muhammad Gunawan¹, Yohanes Joni Pembelum², Rosel³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangka Raya

Article Info

Article history:

Received April 25th, 2021

Revised May 10th, 2021

Accepted May 25th, 2021

Keywords:

Internal Control, Leadership Style, Performance, Accountability, Government Agencies

ABSTRACT (10 PT)

This study aims to provide an empirical explanation of the effect of internal control on the performance accountability of government agencies with leadership style as a moderating variable. The research method used in this research is descriptive statistical analysis, data instrument testing (validity and reliability tests), hypothesis testing, and determination coefficient test. The total population of this study consisted of 18 offices in the city of Palangka Raya using the census method, with the criteria set by the researcher, namely employees of the sub-planning, evaluation, reporting, and financial sections. at the Palangka Raya City Office, 60 people were sampled. The type of data used is primary data. The collected data were analyzed using IBM SPSS Statistics version 25. The results showed that the first hypothesis of internal control has an effect on the performance accountability of government agencies accepted. The second hypothesis of leadership style as a moderating variable strengthens the effect of internal control on the performance accountability of government agencies.

©2021

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author:

Yohanes Joni Pembelum

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: j_pambelum[at]akt.upr.ac.id

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman maka kebutuhan masyarakat akan informasi pun semakin meningkat. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah sudah menjadi hal yang lumrah dan wajib dipenuhi oleh para penyelenggara kegiatan publik termasuk para eksekutif yang duduk dalam jajaran manajemen, agar didalam pengelolaan keuangan daerah masyarakat pun dapat mengetahui dan dapat memantau dari setiap kegiatan dan aliran dana uang masyarakat tersebut. Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extra ordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (*akuntability*) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan (Hermanto, 2020).

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palangka Raya mendapat predikat CC dari Kemenpan RB yang berarti diatas cukup. Menurut Inspektur Kota Palangka Raya Alman Pakpahan, predikat cukup dari Kemenpan RB itu menunjukkan Pemerintah Kota Palangka Raya masih perlu berbenah karena selama lima tahun terakhir Kota Palangka Raya hanya berada dipredikat D sampai CC (Borneonews.co.id, 2019).

Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Hermanto, 2020).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pengendalian intern. Afrina (2015) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemeriksaan terus menerus dan analisa laporan dan catatan-catatan sering disebut pengendalian intern. Pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen diatas, dalam arti yang tegas, dan system tersebut akan; (1) Mengamankan sumber pemborosan, kecurangan, dan ketidak efisienan; (2) Meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi; (3) Mendorong ditaati nya serta dilaksanakannya kebijakan organisasi; (4) Meningkatkan efisiensi. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengusahakan dalam mencapai suatu akhir dari kegiatan operasional maupun administrasi perusahaan. Hal ini memiliki serangkaian tindakan yang dapat meresap dan terintegrasi dalam seluruh proses pengendalian intern dan tidak perlu untuk ditambahkan kedalam infrastruktur suatu perusahaan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah adalah gaya kepemimpinan. Istiqomatunnisa (2017) meneliti tentang pengaruh *good governance*, pengendalian intern dan gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Handoko (2015:297) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua yaitu gaya dengan orientasi tugas dan gaya dengan orientasi karyawan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena maju mundurnya suatu organisasi tergantung seberapa baik pemimpin dapat memainkan perannya agar organisasi tersebut hidup dan berkembang. Pada dasarnya suatu organisasi di dalam memotivasi karyawan tidak dapat lepas dari gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Seorang pemimpin yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat didalam organisasi maka pemimpin tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawannya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori yang mendasari penulisan ini adalah teori agensi. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. Konsep *Agency Theory* menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Penelitian Lane (2000) dalam Puspitasari (2013) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dengan agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri, serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak

terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Hermanto, 2020). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Akuntabilitas publik secara umum terdiri atas dua macam, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal.

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal.

Sedangkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan ini kemudian memunculkan perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga.

Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. Pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu perusahaan yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.

Krismiaji (2015:216) pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern yang dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya tidak dapat dikatakan sepenuhnya efektif, karena keberhasilannya tetap tergantung dari kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Meskipun pengendalian intern telah diterapkan dalam suatu entitas tidak berarti kesalahan dan penyelewengan tidak akan terjadi.

Gaya Kepemimpinan

Menurut pendapat Stoner dalam Handoko (2015:292) bahwa kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan – kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Kepemimpinan adalah bagian penting

manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang – orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup fungsi – fungsi lain seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Menurut Rivai (2014), gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan/atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka pemimpin pada hakikatnya merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang lain sekaligus mampu mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin secara profesional dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang menurutnya dipandang efektif dalam pengelolaan organisasi atau unit kerja.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian intern menurut SPAP mendefinisikan Pengendalian Intern sebagai sistem pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern merupakan kebijakan- kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tresnawati (2012), Taufik (2013), dan Afrina (2015) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah:

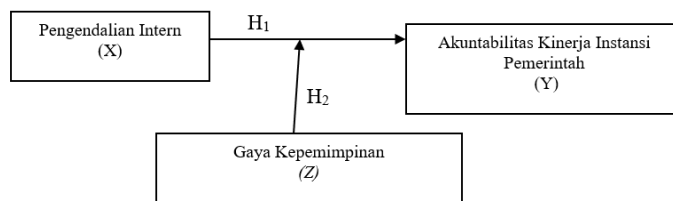
H₁ : Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pengendalian Intern Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia inginkan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi sangat diperlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun iklim motivasi bagi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku organisasinya (Nawawi, 2003:113).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istaqomatunissa (2017) dan Sari (2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas yang ada di kota Palangka Raya yang berjumlah sebanyak 18 Dinas. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah

populasinya yaitu berjumlah 18 Dinas. Responden dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dari setiap Dinas yang terdiri dari pegawai sub bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

Tabel 1. Responden Penelitian

Jumlah Dinas	Responden	Jumlah Responden
18	4	72

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi moderasi melalui metode analisis regresi yang dilakukan secara bertahap (*hierarchical regression analysis*), hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan variabel moderating. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Statistic 25 (*Statistical Package for Social Science*).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.515	.734		11.607	.000
	PI	.453	.026	.917	17.495	.000

Berdasarkan dari hasil regresi linear sederhana yang di dapat maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8,515 + 0,453X + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 8,515 yang berarti bahwa jika tidak ada pengendalian intern (X) maka nilai dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) adalah sebesar 8,515.
2. Koefisien regresi variabel pengendalian intern sebesar 0,453. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi penambahan 1 nilai pengendalian intern (X) maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,453 tanpa dipengaruhi faktor lain.

4.3 Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi

Tabel 3 Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi

Analisis Regresi Linear Berganda						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.411	3.066		6.005	.000
	PI	.253	.114	.512	2.224	.030
	GK	-.396	.109	-.469	-3.626	.001
	PI*GK	.008	.004	.581	2.037	.046

Berdasarkan dari hasil regresi linear berganda yang di dapat maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 18,411 + 0,253X - 0,396Z + 0,008X*Z + e$$

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 18,411 yang berarti bahwa jika tidak ada pengendalian intern (X) maka nilai dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) adalah sebesar 18,411.
2. Koefisien regresi variabel pengendalian intern 0,253. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi

penambahan 1 nilai pengendalian intern (X) maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 0,253 atau sebesar tanpa dipengaruhi faktor lain.

3. Koefisien regresi variabel pengendalian intern yang dimoderasi oleh variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,008. Ini menunjukkan bahwa setiap ditambahkannya 1 gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi maka menghasilkan nilai sebesar 0,008 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

a. Hasil Pengujian Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada H_1 yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 2,224 > t_{tabel} 1,672$ dengan nilai signifikan $0,03 < 0,05$ yang berarti H_1 diterima sehingga pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Hasil Pengujian Pengaruh Pengendalian Intern dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada H_2 yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini ditunjukkan nilai $t_{hitung} 2,037 > t_{tabel} 1,672$ dengan nilai signifikan $0,046 < 0,05$ yang berarti H_2 diterima sehingga gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.841	.838	.646

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 25 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.10. diperoleh hasil sebesar 0,841 atau 84,1%. Hal ini menunjukkan kemampuan pengendalian intern dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya adalah sebesar 0,841 atau 84,1% berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan sisanya sebesar 15,9% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.946 ^a	.895	.889	.534

Sedangkan pada tabel 5 koefisien determinasi (R^2) meningkat menjadi 0,895 atau 89,5 %. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 89,5% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh pengendalian intern dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sisanya, yaitu 10,5% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

Pembahasan

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan hasil signifikan pada variabel pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,03 lebih kecil dari nilai toleransi kesalahan $\alpha = 0,05$. Hasil Uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $2,224 > t_{\text{tabel}} 1,672$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,253 yang memiliki arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengendalian intern maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis (H1) pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresnawati (2012) dan Taufik (2013) yang menyatakan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Afrina (2015) juga menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian intern sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Pengendalian intern akan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi capaian yang dihasilkan, serta keberhasilan kinerja dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika dalam suatu organisasi pengendalian internnya itu lemah maka juga akan menyebabkan kinerja yang tidak maksimal dan itu akan sangat berdampak pada hasil yang didapatkan. Sehingga apabila dalam perusahaan pengendalian intern yang diterapkan berjalan dengan baik maka akuntabilitas kinerja yang dihasilkanpun juga akan semakin lebih baik sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi terhadap pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai (R^2) pada regresi sederhana sebesar 0,841 atau 84,1% dan nilai (R^2) pada regresi dengan variabel moderasi sebesar 0,895 atau 89,5%. Nilai (R^2) setelah ditambahkan variabel moderasi mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mampu memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil regresi menunjukkan adanya pengaruh positif gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi pada pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,046 lebih kecil dari nilai toleransi kesalahan $\alpha = 0,05$. Hasil Uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $2,037 > t_{\text{tabel}} 1,672$. Nilai koefisien regresi sebesar 0,008 yang memiliki arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi gaya kepemimpinan maka semakin memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis (H2) gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam penelitian ini dapat **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Claraini (2017) dan Istiqomatunnisa (2017) yang menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Sari (2017) juga menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan lingkungan kerjanya karena gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika seorang pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat didalam suatu organisasi maka seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk bisa meningkatkan kinerjanya sehingga pengendalian intern yang ada di dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Apabila pengendalian intern dapat berjalan dengan baik dengan adanya gaya kepemimpinan yang membantu meningkatkan kinerja karyawannya maka tujuan organisasi yang

ingin dicapai dapat terwujud sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah Kota Palangka Raya sebaiknya terus meningkatkan pengendalian intern agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan juga semakin menjadi lebih baik.
2. Bagi Peneliti
 - a. Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan faktor-faktor yang lain selain pengendalian intern seperti *Good Governance* dan Komitmen Organisasi yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca.
 - b. Penelitian selanjutnya bisa dilaksanakan pada lingkup wilayah yang lebih luas lagi dengan responden yang lebih banyak.

REFERENCES

- Afrina, Dina. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*.
- Akbar, Subianto Ibnu. 2012. Metode Penelitian (Manajemen dan Akuntansi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Bayu, Fajar. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi S-1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang*.
- Cahyo Adi Nugroho. 2015. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Claraini, Chici. 2017. Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOM Fekon, Vol.4 No.1 (April) 2017*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermanto, C.B. Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal AKRAB JUARA Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (40-56)*.
- Istiqomatunnisa. 2017. Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JOM Fekon Vol. 4 No. 1*.
- Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi (Edisi 4). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- LAN, BPKP. 2000. Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lestari, T.P. 2015. Pengaruh Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*

- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Permana, Hermawan Dian. 2019. Borneonews.co.id : SAKIP dan Lakip Pemko Palangka Raya Dapat Predikat CC <https://www.borneonews.co.id/berita/119309-sakip-dan-lakip-pemko-palangka-raya-dapat-predikat-cc> (11 Maret 2019)
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2013. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sari, Embun Widya. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017*.
- Scott, R. William. 2015. *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sumiati. 2012. Tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Siak.
- Taufik, Taufeni dan Dian Kemala. 2013. Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik. *Pekbis Jurnal, Vol.5, No.1, Maret 2013: 51-63*.
- Tresnawati, Rina. 2012. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Bandung. *Jurnal Forum Bisnis & Keuangan I Daerah*.
- Triseptya, Ghaliyah Nimassita. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Moderasi. *Jurnal management dan bisnis Vol 1 No 1*.